

**PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN
DAN PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NI KETUT RENDI ASTUTI
(Dosen STIA Denpasar)**

**NI MADE GUNASTRI
(Dosen STIMI Handayani Denpasar)**

Abstrak : This research is carried out based on the little contribution income of tourism sector towards the real income of Klungkung regency for eight years whereas the tourism facilities that have been available sufficiently to attract the more total tourists visit.

The variable use in this research involves : the total tourist visit (X1), the total taxes of restaurants and hotels (X2), the total retribution of tourism object (X3) and total real income (Y) of Klungkung Regency in the year 2003 to 2010.

The instrument analysis which is used in this research are regression linier is use to analyze the influence of the total tourist visit, total taxes in restaurant and hotel income, tourist objects retribution toward the real income of Klungkung regency for eight years 2003 to 2010

The result of the research is that the total tourist visit, restaurant and hotels income taxes, and retribution of tourist resorts places all together significantly affected the original Regional Revenues of Klungkung Regency from 2003 to 2010. The total tourist visit place partially and significantly affected the Original Regional Revenues of Klungkung from 2003 to 2010, The taxes imposed upon the hotel and restaurant partially but insignificantly affected the Original Regional Revenues of Klungkung from 2003 to 2010. And retribution of tourist resorts places partially but insignificantly but insignificantly affected the Original Regional Revenues from 2003 to 2007.

Key words : Total tourist visit, The Income of Tourism Sector, Original Regional Revenues.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sehingga mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, meningkatkan keadaan sosial daerah untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat daerah. Arsyad (1999 ; 298)

mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada untuk membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lowongan kerja baru, dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah.

Sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk memperbesar

pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kegiatan ekonomi.

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Spillance, 1994 : 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia. Serta memupuk rasa cinta dan mempererat persahabatan antar Bangsa.

Kepariwisataan memiliki arti yang sangat luas, dan bukan hanya sekedar bepercgian saja, namun juga berkaitan obyek dan daya tarik wisata yang dikunjungi, sarana transportasi yang digunakan, pelayanan, akomodasi, restoran dan rumah makan, hiburan, interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat serta usaha pariwisata. Karena itu pariwisata dapat dipandang sebagai suatu lembaga dengan jutaan interaksi, kebudayaan dengan sejarahnya, kumpulan pengetahuan, dan jutaan orang yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelembagaan ini (Purwowibowo, 1998 : 4). Sehingga pariwisata sebagai konsep dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda. Pariwisata juga mampu menumbuhkan aspirasi dan tuntutan dari masyarakat itu dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil makmur dan sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah karena hampir setiap daerah diseluruh wilayah Republik Indonesia dihadapkan dengan masalah keuangan sebagaimana dikatakan oleh Nazara (1997 : 21), bahwa pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi potensi keuangannya. Potensi keuangan daerah salah satu bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk menjamin kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat daerah, setiap daerah melalui Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota yang ada di Propinsi Bali hanya beberapa daerah kabupaten saja yang telah memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang relatif tinggi seperti Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng, sedangkan Kabupaten lainnya masih relatif kecil. Usaha – usaha yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari

Sektor Pariwisata adalah dengan melakukan promosi pariwisata baik dalam maupun luar negeri.

Dari sisi pendapatan daerah, sebagian besar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung disumbang dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk salah satu di dalamnya adalah pajak hotel dan restoran, retribusi objek wisata. Objek dan daya tarik wisata (ODTW) yang

dimiliki oleh Kabupaten Klungkung cukup bervariasi seperti objek wisata Kerta Gosa, Pura Goa Lawah, Jungut Batu dan Desa kesenian wayang tradisional Kamasan serta Rafting yang masing-masing mempunyai daya tarik dan sejarah tersendiri sehingga tidak henti-hentinya para wisatawan untuk mengunjunginya. Adapun wisatawan yang berkunjung dan yang menginap di Kabupaten Klungkung tahun 2003 – 2010 dapat dilihat dalam tabel 1

Tabel. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah yang menginap di Kabupaten Klungkung
Tahun 2003 – 2010

Tahun	Kunjungan Wisatawan (Orang)	Wisatawan Menginap (Orang)	Wisatawan Menginap (%)
2003	100.112	356	0,35
2004	102.912	402	0,39
2005	147.103	446	0,30
2006	126.843	822	0,65
2007	145.017	826	0,57
2008	277.758	849	0,30
2009	269.814	2.251	0,83
2010	290.454	2.568	0,88
JumLAH	1.460.013	8.520	4,27
Rata - Rata	184.597	1.065	0,53

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Tahun 2010

Tabel. 1 menunjukkan bahwa tamu yang menginap di Kabupaten Klungkung bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan sangat kecil sekali. Ini artinya bahwa tamu yang datang hanya menikmati obyek wisata yang ada di Kabupaten Klungkung selanjutnya menginap di Kabupaten lain yang ada di Bali. Sehingga tingkat hunian hotel selama delapan sebesar 4,27 persen (rata-rata per tahun sebesar 0,53 persen), inipun merupakan perjuangan yang berat buat Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Dinas Pariwisata untuk melakukan promosi baik didalam dan luar negeri serta melakukan service yang baik sehingga hunian hotel bisa meningkat.

Kontribusi yang diberikan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung perlu terus digalakkan

sehingga kedepan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Sumber yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah Klungkung berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN / BUMD, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 2 disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten / Kota terdiri dari 7 (tujuh) jenis pajak antara lain : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah dan pajak penambangan galian C. Untuk melihat perkembangan dan kontribusi penerimaan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2003 – 2010 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Perkembangan dan Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata (PHR dan ROW) Terhadap PAD Kabupaten Klungkung Tahun 2003 - 2010

No	Tahun Anggaran	PAD (Jutaan Rp)	Penerimaan Sektor Pariwisata			Persentase dari PAD (%)
			PHR (Jutaan Rp)	ROW (Jutaan Rp)	Jumlah (Jutaan Rp)	
1	2003	15.256,69	291,17	319,76	610,93	4,00
2	2004	12.714,85	457,43	443,45	900,88	7,08
3	2005	16.374,12	632,18	509,47	1.141,65	6,97
4	2006	18.983,42	504,07	367,96	872,03	4,59
5	2007	22.813,86	671,77	460,93	1.132,70	4,96
6	2008	29.028,56	1.427,13	734,55	2.161,68	7,45
7	2009	29.566,92	1.231,24	1.312,45	2.543,69	8,60
8	2010	31.311,32	1.147,81	1.324,78	2.472,59	7,90
Jumlah		176.049,74	6.362,8	5.473,35	10.816,72	51,55
Rata-Rata		22.006,22	795,35	684,17	1.352,09	6,44

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2010

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa kontribusi penerimaan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung selama delapan tahun tidak begitu besar yaitu 51,55 persen (rata-rata per tahun 6,44 persen). Karena merupakan sumber yang cukup menentukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung lebih lanjut perlu dilakukan penelitian bagaimana pengaruh Kunjungan wisatawan dan penerimaan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dan faktor – faktor mana yang dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan sektor pariwisata (PHR dan ROW) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung tahun 2003 - 2010

1.3 Hipotesis

Bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah penerimaan sektor pariwisata

yang terdiri dari pajak hotel dan restoran (PHR) dan retribusi obyek wisata (ROW) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2003 – 2010

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan dan penerimaan sektor pariwisata (PHR dan ROW) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2003 - 2010

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1 Manfaat akademik sebagai bahan kajian atau penelitian lebih lanjut serta menambah referensi bidang ekonomi dan kepariwisataan pada perpustakaan kampus.
- 2 Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Klungkung khususnya yang terkait dengan arah investasi dan alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten.

1.6 Jenis dan Sumber Data

- 1 Data kuantitatif adalah data yang bisa diukur secara kuantitatif yaitu berupa data sekunder / data jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung dan data penerimaan sektor pariwisata yang didapat dari kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Klungkung, Data Jumlah kunjungan wisatawan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dan Kantor BPS Kabupaten Klungkung dengan melakukan wawancara langsung terhadap pejabat yang berwenang.
- 2 Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dengan angka-angka yang digunakan dalam memberikan penjelasan yang relevan, seperti pengertian PAD, keterangan mengenai daerah penelitian yang diperoleh di Kantor BPS Kabupaten Klungkung dan buku – buku yang dipublikasikan yang dapat mendukung terhadap penelitian ini.

1.7 Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis regresi linier yaitu untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan dari sektor pariwisata (PHR dan ROW) terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung (Gujarati, 1995 : 66) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + U_i$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung

X_1 = Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Klungkung

X_2 = Jumlah Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

X_3 = Jumlah Penerimaan Retribusi Obyek Wisata (ROW)

a = Konstanta

$b_1 b_2 b_3$ = Koefisien regresi dari yang akan di taksir

U_i = Variabel Pengganggu

II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Wisata, Pariwisata, Kepariwisataaan dan Wisatawan

g Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata mengandung unsur sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek atau daya tarik wisata. Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila di sela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata, perjalanan dalam bahasa inggris dapat disamakan dengan perkataan “*travel*”.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dengan demikian pariwisata meliputi : (1) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, (2) Pengusaha obyek dan daya tarik wisata seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pertunjukan seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah : keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai, (3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu : usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan

wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata, usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata. Jadi yang dimaksud dengan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lain yang dalam bahasa inggris disebut “*tour*”.

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian pariwisata, antara lain Hunziker dan Kraff (Pendit, 1994 : 38) menyatakan pariwisata adalah sejumlah hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai usaha mencari kerja penuh.

Kepariwisata adalah yang berhubungan dengan masalah pariwisata baik sejarah perkembangannya yang sangat pesat sekali dalam dekade terakhir, namun apa yang telah diperoleh sekarang ini sesungguhnya telah dirintis semenjak berpuluh tahun sebelumnya. Perkembangan kepariwisataan di Indonesia dapat dibagi tiga bagian atau periode penting yaitu periode masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa setelah Indonesia merdeka, yang diawali dengan meningkatnya perdagangan antara benua Eropa dengan negara-negara Asia dan Indonesia mengakibatkan ramainya lalu lintas orang-orang bepergian dengan bermacam-macam motif sesuai dengan keperluan masing-masing, sehingga banyak berdiri Travel Agent dan hotel-hotel untuk menjamin akomodasi bagi mereka yang berkunjung ke daerah-daerah yang menjadi tujuan mereka. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tourism*”.

Menurut Herman V. Schulalard, (Yoeti Oka, 1990 : 105) menyatakan yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah sejumlah

kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian yang secara langsung berhubungan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara. Karena batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka batasan ini lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapi tidak secara tegas menunjukkan aspek-aspek sosiologi, psikologi, seni budaya maupun aspek geografis kepariwisataan.

Menurut Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf (Yoeti Oka, 1990 : 106) menyatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan dari pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepariwisataan dalam dunia modern pada hakekatnya adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi hiburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat-lihat daerah lain (pariwisata dalam negeri) atau negara-negara lain (pariwisata luar negeri).

Dari beberapa batasan yang disebutkan diatas, tampak bahwa pada prinsipnya kepariwisataan dapat mencakup semua macam perjalanan, asal saja perjalanan tersebut dengan pertamasyaan dan rekreasi. Dalam hal ini diberikan suatu garis pemisah yang mengatakan bahwa perjalanan tersebut diatas tidak bermaksud untuk memangku suatu jabatan di suatu tempat atau daerah tertentu. Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan yaitu antara lain, 1) perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu, 2) perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya, 3) perjalanan itu walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi, 4) orang yang

melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen ditempat tersebut.

Wisatawan adalah seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu dengan alasan apapun juga tanpa memangku jabatan atau pekerjaan di negara yang dikunjungi. Dari batasan ini jelaslah, bahwa maksud perjalanannya itu bukan untuk urusan yang berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari serta dilakukan untuk sementara waktu dan dinegara yang dikunjungi semata-mata sebagai konsumen dimana ia tinggal hanya untuk sementara waktu. Adapun alasan-alasan yang biasanya lebih menonjol diantaranya ialah : kesehatan, kesenangan, pendidikan, agama, kebudayaan, hobi, olah raga, konferensi, seminar dan lain-lain, Oka A Yoeti (1990:71) Menurut A.J. Norwal (Yoety Oka, 1990 : 129) mengatakan bahwa seorang wisatawan adalah seorang yang memasuki wilayah negeri asing dengan maksud tujuan apapun, asalkan bukan untuk tinggal permanen atau untuk usaha-usaha yang teratur melintasi perbatasan dan yang mengeluarkan uangnya dinegeri yang dikunjungi, uang mana telah diprolehnya bukan dari negeri tersebut, tetapi di negeri lain. Yang penting adalah bahwa uang yang dibelanjakan tersebut bukan diperoleh di negeri yang ia kunjungi, tetapi diperoleh di negeri lain atau tempat asalnya.

Ciri-ciri seseorang dapat disebut sebagai wisatawan yaitu antara lain, 1) perjalanan itu dilakukan lebih dari 24 jam, 2) perjalanan itu dilakukannya hanya untuk sementara waktu, 3) orang yang melakukannya tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjungi. Sehingga dapat dikatakan bila tidak memenuhi syarat tersebut diatas maka orang tersebut belum dapat dikatakan sebagai seorang wisatawan.

2.2 Hubungan Pariwisata Dengan Pembangunan Ekonomi

Untuk menggalakan pembangunan ekonomi dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, sektor pariwisata juga dapat memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Majunya industri pariwisata sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang dan adanya pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Karena itu tidak hanya ada perusahaan yang dapat menyediakan kamar untuk penginapan. Restoran dan rumah makan untuk konsumsi makanan dan minuman, industri kerajinan untuk menyediakan cinderamata, pramuwisata sebagai pemandu wisata, akan tetapi diperlukan juga prasarana dan sarana yang memadai sebagai infrastruktur yang dapat menunjang sektor pariwisata itu sendiri. Menurut Spillane (1994 : 37) ada beberapa elemen dalam menentukan hubungan pariwisata dengan pembangunan ekonomi, yaitu : (a) jenis pariwisata, (b) struktur ekonomi nasional, (c) hubungan antara perpindahan modal dan migrasi tenaga kerja. Hal ini mengisyaratkan bahwa pariwisata dalam pembangunan ekonomi nasional tergantung secara parsial pada organisasi permodalan dan khususnya kemampuan modal dari luar negeri untuk ditanamkan di dalam negeri.

Aspek lain yang dianggap penting dalam kebijaksanaan ekonomi ialah pembangunan daerah secara regional melalui kegiatan kepariwisataan. Terutama dalam menghadapi timbulnya urbanisasi yang menimbulkan banyak masalah dan ekonomi diperkotaan. Pariwisata dapat memberi kesempatan berusaha baik kepada pendatang maupun penduduk sekitarnya.

Menurut Sukarsa (1999 : 62) terdapat dua tipe pembangunan pariwisata berdasarkan

pada pola, proses dan tipe pengelolaannya yaitu tipe tertutup atau terstruktur dan tipe terbuka atau tidak terstruktur. Tipe tertutup telah berhasil membangun dan mengembangkan kawasan pariwisata seperti kawasan pariwisata Nusa Dua. Sedangkan tipe terbuka atau tidak terstruktur dapat diambil contoh pada daerah – daerah pariwisata yang perkembangannya secara spontan, seperti kawasan pariwisata Sanur dan Kuta.

2.3 Pariwisata Sebagai Industri

Dalam konteks pariwisata sebagai industri, Pendit (1994 : 19) telah memperkenalkan beberapa istilah seperti *industry of the invisible export* (industri eksport tidak nyata), *hospital industry* (industri ramah tamah), atau *service industry* (industri jasa pelayanan). Adapun batasan tentang industri pariwisata menurut Yoeti (1990 : 9) adalah kumpulan dari bermacam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan *traveller* pada umumnya, selama dalam perjalanan. Dalam pengertian ekonomi mikro yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah setiap unit produksi yang dapat menghasilkan produk atau jasa tertentu, sedangkan dalam pengertian ekonomi makro yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah keseluruhan unit-unit industri (*travel agent, tourist transportation, hotel, catering trade, tour operator, tourist object, tour attraction, souvenir shop*) baik tempat kedudukannya di dalam negeri atau di luar negeri yang ada kaitannya dengan perjalanan wisatawan yang bersangkutan.

Menurut Prajogo (1976 : 44-45) pariwisata sebagai industri mempunyai beberapa sifat khusus, yang membedakannya dengan industri lain. Sifat khusus tersebut adalah : (a) produk wisata mempunyai ciri

bahwa ia tidak dapat dipindahkan. Orang tidak dapat membawa produk wisata pada pelanggan, tetapi langganan itu sendiri harus mengunjunginya, mengalami dan datang untuk menikmati produk wisata itu, (b) dalam pariwisata produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang sama. Tanpa langganan yang sedang mempergunakan jasa-jasa itu tidak akan terjadi produksi, (c) sebagai suatu jasa, maka pariwisata memiliki berbagai ragam bentuk, oleh karena itu dalam pariwisata tidak ada standar ukuran yang obyektif, sebagaimana produk lain yang nyata misalnya ada panjang, lebar, isi, kapasitas dan sebagainya seperti pada sebuah mobil, (d) langganan tidak dapat mencicipi, mengetahui atau menguji produk itu sebelumnya, yang dapat dilihat hanya brosur-brosur, gambar-gambar, (e) dari segi usaha, produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar. Industri pariwisata memerlukan modal yang besar, sedangkan permintaan sangat peka terhadap perubahan situasi ekonomi, politik, sikap masyarakat, kesenangan wisatawan dan sebagainya. Dan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan industri yang memiliki banyak bentuk serta tidak dapat dipindahkan dan sebaiknya mempunyai langganan.

2.4 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan,
- c. Pinjaman daerah,

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupdirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan – terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah melalui pengembangan sektor pariwisata.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya peningkatan penerimaan sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber dan potensi ekonomi masyarakat. Dari setiap pembiayaan dengan adanya pemberian otonomi maka dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah secara bertahap daerah dituntut dapat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah senantiasa harus mampu meningkatkan dan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dalam bentuk pendapatan asli daerah.

Berbicara mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan

asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten / Kota terdiri dari : (a) Hasil pajak, (b) Hasil retribusi daerah, (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain : bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah), (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari berbagai komponen sumber pendapatan asli daerah tersebut terdapat beberapa komponen yang selama ini penerimaannya sangat potensial, sehingga menjadi sumber andalan bagi pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan otonomi daerah selain sebagai pendukung terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab juga menggambarkan berapa pemberian kepada masyarakat disamping gambaran tentang berapa yang dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Widayat (1994 : 32) ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu melalui peningkatan penerimaan semua sumber pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi untuk pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya.

Cara ekstensifikasi dapat dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak dan retribusi ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Namun cara yang paling tepat dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan intensifikasi karena ini tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat namun bila dilakukan cara ekstensifikasi akan dapat membuat masyarakat resah karena tidak siap untuk dikenakan pajak baru dalam situasi perekonomian yang sedang tidak stabil.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat (Spillane, 1987 : 138) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah : (a) menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali pendapatan asli daerah, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan, (b) membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut, (c) menambah devisa negara. Dengan makin banyaknya wisatawan yang datang, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh, (d) merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

2.5 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah digolongkan kedalam dua katagori menurut tingkat Pemerintahan

Daerah yaitu : Pajak Propinsi dan Pajak kabupaten/Kota. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak propinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Jenis Pajak Kabupaten / Kota sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah :

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
- 2) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran.

- 3) Pajak Restourant adalah pajak atas pelayanan restourant.
- 4) Restourant atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
- 5) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 6) Hiburan adalah semua jenis pertunjukan permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.
- 7) Pajak Reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.
- 8) Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang membuat bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk diperkenalkan, menganjurkan atau menyajikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- 9) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah daerah.
- 10) Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Dalam era otonomi ini meskipun Pemerintah daerah memperoleh keleluasaan dalam hal menambah jenis-jenis pajak baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah, namun menurut Simanjuntak (2003 : 8) ada beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk menentukan sumber pajak tersebut, yaitu : 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi, 2) Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilisasi yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan, 3) Objek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 4) Objek pajak bukan merupakan objek propinsi atau pusat, 5) Potensinya memadai, 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

III PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Retribusi Obyek Wisata (ROW) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung

Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari beberapa variabel pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klungkung dipergunakan alat analisis regresi linier (Gujarati, 1995 : 66) sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + u_1$$

Dimana

Y = PAD Kabupaten Klungkung

X_1 = Jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

X_2 = Jumlah penerimaan Retribusi Obyek Wisata (ROW)

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi dari yang akan ditaksir

u_1 = Variabel pengganggu

Sesuai hipotesis yang telah disajikan yaitu jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Retribusi Obyek Wisata (ROW) berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD Kabupaten Klungkung tahun 2003 - 2010. Dari perhitungan komputer dengan menggunakan tabel yang diolah dengan program SPSS dari lampiran 3 ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = 12,815 - 7,779X_1 + 20,671 X_2$$

$$t = (-1,164) \quad (3,316)$$

$$\text{Sig} = (0,297) \quad (0,021)$$

$$F = 8,517 \text{ sig } 0,025$$

$$R^2 = 0,773$$

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,773 atau 77,3 persen berarti varian Pendapatan Asli Daerah (Y) dipengaruhi oleh varian Pajak Hotel dan Restoran (X_1) dan varian Retribusi Obyek Wisata (X_2) sebesar 77,3 persen sedangkan 22,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercantum dalam model tersebut.

1. Pengujian secara simultan (Uji F)

Pengujian pengaruh pajak hotel dan restoran (X_1) dan retribusi obyek wisata (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) secara bersama-sama (simultan). Uji F sebesar 8,517 dengan nilai signifikan sebesar 0,025 yang berada dibawah tingkat signifikan 5 persen (0,05) yang berarti bahwa variabel X_1 yaitu pajak hotel dan restoran (PHR) dan variabel X_2 yaitu variabel retribusi obyek wisata (ROW) secara serempak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu variabel Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan bahwa pajak hotel dan restoran dan retribusi obyek wisata mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung.

2. Pengujian secara parsial (Uji t)

Pengujian pengaruh pajak hotel dan restoran (X_1) secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar -1,164 dengan nilai signifikansi sebesar 0,297 yang berada diatas tingkat signifikan 5 persen (0,05) yang berarti bahwa variabel pajak hotel dan restoran (X_1) tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Koefisien regresi pajak hotel dan restoran sebesar -7,779 mempunyai arti bahwa setiap penurunan pajak hotel dan restoran sebesar 1 persen menyebabkan penurunan langsung terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung sebesar -7,779 persen

Pengujian pengaruh retribusi obyek wisata (X_2) secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 3,316 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang berada dibawah tingkat signifikan 5 persen (0,05) yang berarti bahwa variabel retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Koefisien regresi retribusi obyek wisata sebesar 20,671 yang berarti setiap adanya peningkatan retribusi obyek wisata sebesar 1 persen menyebabkan peningkatan langsung terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung sebesar 20,671 persen

4.2 Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Sektor Pariwisata (PHR dan ROW) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung

Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari beberapa variabel pariwisata terhadap

PAD Kabupaten Klungkung dipergunakan alat analisis regresi linier (Gujarati, 1995 : 66) sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + u_1$$

Dimana

Y = PAD Kabupaten Klungkung

X_1 = Jumlah Kunjungan Wisatawan

X_2 = Jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

X_3 = Jumlah penerimaan Retribusi Obyek Wisata (ROW)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi dari yang akan ditaksir

u_1 = Variabel pengganggu

Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan pariwisata yaitu dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan dari Retribusi Obyek Wisata (ROW). Berdasarkan hasil olahan data SPSS seperti yang disajikan pada lampiran 4 dapat ditampilkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = 6,081 + 0,0095 X_1 + 1,474 X_2 - 3,711 X_3$$

$$t = \begin{matrix} & (3,145) & (1,357) \\ (-0,513) \end{matrix}$$

$$\text{sig} = \begin{matrix} & (0,035) & (0,246) \\ (0,635) \end{matrix}$$

$$F = 14,926 \text{ sig } 0,012$$

$$R^2 = 0,918$$

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,918 atau 91,80 persen varian pendapatan asli daerah (Y) dipengaruhi oleh varian jumlah kunjungan wisata (X_1), varian pajak hotel dan restoran (X_2) dan varian retribusi obyek wisata (X_3) sebesar 91,80 persen sedangkan sisanya sebesar 8,20 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercantum dalam

model tersebut.

1. Pengujian secara simultan (Uji F)

Uji F sebesar 14.926 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang berada dibawah tingkat signifikan 5 persen (0,05) yang berarti variabel kunjungan wisata (X_1), variabel pajak hotel dan restoran (X_2) dan variabel retribusi obyek wisata (X_3) secara serempak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa kunjungan wisata, pajak hotel dan restoran dan retribusi obyek wisata mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung .

2. Pengujian secara parsial (uji t)

Uji t pada kunjungan wisata (X_1) sebesar 3,145 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 yang berada dibawah tingkat signifikan 5 persen (0,05) yang berarti variabel kunjungan wisata (X_1) berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Koefisien regresi kunjungan wisatawan sebesar 0,095 mempunyai arti bahwa setiap kenaikan seorang wisatawan di Kabupaten Klungkung menyebabkan kenaikan langsung pendapatan asli daerah dari pariwisata sebesar 0,095 persen.

Uji t pada pajak hotel dan restoran (X_2) sebesar 1,357 dengan nilai signifikansi sebesar 0,246 yang berada diatas tingkat signifikan 5 persen (0,05) yang berarti pajak hotel dan restoran (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Koefisien regresi pajak hotel dan restoran sebesar 1.474 yang berarti setiap adanya peningkatan pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran sebesar 1 persen akan menyebabkan adanya kenaikan langsung terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung sebesar 1.474 persen

Uji t pada retribusi obyek wisata (X_3) sebesar -0,513 dengan nilai signifikan sebesar

0,635 yang berada diatas tingkat signifikan 5 persen (0,05) yang berarti variabel retribusi obyek wisata (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Koefisien regresi retribusi obyek wisata sebesar -3.711 yang berarti setiap adanya penurunan retribusi obyek wisata sebesar 1 persen akan menyebabkan adanya penurunan langsung terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung sebesar -3.711 persen.

IV SIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dengan menggunakan perhitungan analisis regresi linier dapat di simpulkan bahwa :

1. Pajak hotel dan restoran dan retribusi obyek wisata secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Pajak hotel dan restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Retribusi obyek wisata secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Hal ini mengindikasikan bahwa wisatawan baik domestik maupun mancanegara hanya mengunjungi obyek-obyek wisata di Kabupaten Klungkung dan tidak menginap di hotel-hotel yang telah tersedia di Kabupaten Klungkung karena hanya retribusi obyek wisata yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung.
2. Kunjungan wisatawan dan pajak

hotel dan restoran dan retribusi obyek wisata secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Kunjungan wisatawan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Pajak hotel dan restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Retribusi obyek wisata secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Adanya tambahan variabel kunjungan wisatawan secara serempak variabel kunjungan wisatawan, pajak hotel dan restoran dan retribusi obyek wisata mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung.

1.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan di atas dan untuk memajukan Kabupaten Klungkung secara keseluruhan maka dapat disarankan sebagai berikut :

1.Oleh karena penerimaan dari sektor pariwisata (PHR dan ROW) yang sedang diteliti merupakan sektor andalan maka Pemerintah Kabupaten Klungkung hendaknya lebih memberikan prioritas kucuran dana untuk melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap objek wisata yang telah ada baik yang ada di Klungkung daratan maupun di Kecamatan Nusa Penida.

2.Pelaksanaan promosi ke luar negeri dan di dalam negeri melalui duta-duta kesenian Kabupaten Klungkung hendaknya terus dilaksanakan dan ditingkatkan sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Klungkung bisa bertambah setiap tahun.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama BPFE. Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 1999. *UU No 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Departemen Dalam Negeri, 2000. *UU No 34 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Departemen Dalam Negeri, 2004. *UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Erawan, I Nyoman. 1995. *Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Bali (1984 – 1994)*. Majalah Ilmiah UNUD No 44 Tahun XXII, 24-32.
- Glason, John, 1975. *An Introduction to Regional Planning, Concepts Theory and Practice*, Hutchivision & Co (Publisher) Ltd London.
- Gujarati. D.N. 1978. *Ekonomitrika Dasar*. Penerbit Erlangga.
- Pendit, S. Nyoman, 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prajogo, MI, 1976. *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta.
- Purwowibowo, 1998. *Pariwisata dan Prospek Ekowisata di Karesidenan Besuki*, Makalah Seminar Pariwisata, Unej, Jember.
- Rangkuti, Fredly, 1999. *Analisa SWOT membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Spillane, J James, 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Spillane, J James, 1994, *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sukarsa I Made. 1999. *Pengantar Pariwisata*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur.
- Supranoto. 1983. *Pengantar Ekonometrika*, Buku I. LPFE – UI. Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 1990. *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung.
- Yoeti, Oka A. 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung

VI DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DATA YANG DIPERGUNAKAN DALAM ANALISIS PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN, RETRIBUSI OBYEK WISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2003 - 2010

Tahun	PAD (Jutaan Rp.) (Y)	PHR (Jutaan Rp.) (X ₁)	ROW (Jutaan Rp.) (X ₂)
2003	15.256,89	290,17	319,76
2004	12.714,85	457,43	443,45
2005	16.374,12	632,18	509,47
2006	18.983,42	504,06	367,96
2007	22.813,86	671,77	460,93
2008	29.028,56	1.427,13	734,55
2009	29.566,92	1.231,24	1.312,45
2010	31.311,32	1.147,81	1.324,78
Jumlah	176.049,74	6.361,79	5.473,35

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Klungkung Tahun 2010 (data diolah)

Lampiran 2. DATA YANG DIPERGUNAKAN DALAM ANALISIS REGRESI PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN, PENERIMAAN PARIWISATA (PHR DAN ROW) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2003 - 2010

Tahun	PAD (Jutaan Rp.) (Y)	Kunjungan Wisatawan (X ₁)	PHR (Jutaan Rp.) (X ₂)	ROW (Jutaan Rp.) (X ₃)
2003	15.256,89	100.112	290,17	319,76
2004	12.714,85	102.913	457,43	443,45
2005	16.374,12	147.103	632,18	509,47
2006	18.983,42	126.843	504,06	367,96
2007	22.813,86	145.017	671,77	460,93
2008	29.028,56	277.758	1.427,13	734,55
2009	29.566,92	269.814	1.231,24	1.312,45
2010	31.311,32	290.454	1.147,81	1.324,78
Jumlah	176.049,74	1.460.013	6.361,79	5.473,35

Sumber : Dinas Pendapatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2010 (data diolah)

Lampiran 3. PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.879 ^a	.773	.682	4080.31999	.773	8.517	2	5	.025	.952

a. Predictors: (Constant), ROW, PHR

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.836E8	2	1.418E8	8.517	.025 ^a
	Residual	8.325E7	5	1.665E7		
	Total	3.668E8	7			

a. Predictors: (Constant), ROW, PHR

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12815.535	3067.933		4.177	.009		
	PHR	-7.779	6.683	-.411	-1.164	.297	.363	2.751
	ROW	20.671	6.234	1.172	3.316	.021	.363	2.751

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 4. PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN, PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA (PHR DAN ROW) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Regression

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.958 ^a	.918	.856	2743.49812	.918	14.926	3	4	.012	1.881

a. Predictors: (Constant), ROW, PHR, Kunjungan Wisata

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	Sig.
1	Regression	3.370E8	3	1.123E8	14.926
	Residual	3.011E7	4	7526781.947	.012 ^a
	Total	3.671E8	7		

a. Predictors: (Constant), ROW, PHR, Kunjungan Wisata

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6081.019	2730.934		2.227	.090	
	Kunjungan Wisata	.095	.030	.978	3.145	.035	.212
	PHR	1.474	1.086	.332	1.357	.246	.343
	ROW	-3.711	7.238	-.210	-.513	.635	.122

a. Dependent Variable: PAD